



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SURABAYA
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RACHMAD BASARI
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 718701

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 6.675.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/143 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , WARISAN Rp. 2.350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 3.750.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 85 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 575.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 926.500.000

1. MOTOR, YAMAHA SPM SOLO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOTOR, HONDA SPM SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOBIL, TOYOTA JEEP Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. MOBIL, SUZUKI JIMNY JB 74 JEEP Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 515.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ---

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 1.036.500.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 8.638.000.000

III. HUTANG

Rp. 356.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 8.282.000.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.